

## DAFTAR PUSTAKA

- Suci, Tri Sukma Melati, Herman Karamoy, dan Sintje Rondonuwu. 2019. “Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Final Pada KPP Pratama Manado.” *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI* 14 (4).
- Suryani, Wahyu, Maslichah, dan Junaidi. 2019. “Pengaruh Pengalihan PP 46 2013 Menjadi PP 23 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPH Pasal 4 Ayat (2) di KPP Pratama Pasuruan.” *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* 8 (02).
- Harun, Irmasari, Nur Diana, dan M. Cholid Mawardi. 2019. “Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Bagi UMKM di Kota Malang.” *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* 8 (10)
- W. Trijali. 2016. “Analisis penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2)” *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 3 (04)
- Khrisna, Intan. 2017. “Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang.” *Jurnal Akuntansi* 5 (01)
- Prayogi, Endah. 2014. “Efektifitas Penerimaan Pajak Penghasilan Final Pada KPP Pratama Magelang Tahun 2013” *Tugas Akhir. Universitas Negeri*

*Yogyakarta.*

Novi, Anggraeni. 2019. “Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2).” *Universitas Pancasakti Tegal.*

Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat. [SEP]

Fitriya, Fitriya. 2021. “Siapa Yang Boleh Menggunakan Tarif PPh Final PP No 23 2018?” Diambil dari : <https://klikpajak.id/blog/tarif-pph-final-pp-no-23-tahun-2018/>. 8 Maret 2021.

Prabanbaru, A.2018. “Inilah Poin Penting PP Nomor 46 Tahun 2013 Yang Harus Dipahami Pemilik Usaha”. Diambil dari : <https://klikpajak.id/blog/pp-no-46-tahun-2013-poin-penting/>. 8 Maret 2021.

Nurhidayat, D. 2020. “Ditengah Pandemi, Kontribusi UMKM Terhadap PDB Diperkirakan Naik”. Diambil dari : <https://mediaindonesia.com/ekonomi/360372/di-tengah-pandemi-kontribusi-umkm-terhadap-pdb-diperkirakan-naik>. 8 Maret 2021.

Amalia, Shinta. 2018. “Dari PP 46/2013 hingga PP 23/2018”. Diambil dari : <http://www.pajak.go.id/article/dari-pp-462013-hingga-pp-232018>. Hal : 1. 1 Maret 2021.

Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia (2018). “Tarif Khusus Pajak Penghasilan Bagi UMKM”. Diambil dari : <http://www.pajak.go.id>. 1 Maret

2021.

Gustomo, Ma'ruf. 2018. "Menciptakan Pajak yang Ramah untuk UMKM".  
Online. Diambil dari : <http://www.kemenkeu.go.id>. 1 Maret 2021.

Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Berita Negara RI Tahun 2013, No. 984. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia (2013). Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Lembaran Negara RI Tahun 2013, No. 5424. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia (2013). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-42/PJ/2013 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Lembaran Negara RI Tahun 2013. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.

Republik Indonesia (2018). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran

Bruto Tertentu. Lembaran Negara RI Tahun 2018, No. 1146. TU  
Kementerian. Jakarta.

Republik Indonesia (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang  
Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau  
Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Lembaran  
Negara RI Tahun 2018, No. 89. Sekretariat Negara. Jakarta.